

PENGELOLAAN PASAR WIRABAYA OLEH PEMERINTAH DESA RAJADESA KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS

Aditia Lukmana

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : lukmanaaditya99@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Pasar Wirabaya oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis masih belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih terdapat tarik menarik status ruko dan jual-beli ruko yang tidak diketahui oleh pemerintah desa dan pengelola pasar, tidak adanya ketegasan dari pemerintah desa dalam penataan fasilitas pasar, tidak adanya aturan, wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan perekrutan pengurus Pasar sesuai dengan kebutuhan pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian pada empat (4) indikator terdapat dua (2) dimensi sudah berjalan dengan optimal yaitu dimensi perencanaan dan kepemimpinan, sedangkan dua (2) dimensi yang belum optimal yaitu dimensi pengorganisasian dan pengendalian.

Kata Kunci :

PENDAHULUAN

Upaya Pemerintah dalam menjalankan misi pembangunan nasional salah satunya membangun perekonomian yang stabil sesuai dengan undang-undang dasar dan pancasila sebagaimana diatur dalam UU RI No. 25 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) bahwa “Pembangunan Nasional adalah Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”. Tujuan bernegara yaitu dalam melindungi segenap bangsa, memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan suatu pedoman dalam mengendalikan perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat. diantara tujuan bernegara terdapat fungsi kesejahteraan dan kemakmuran yang dimana negara mengeksplorasi sumberdaya alam yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Spesifik dari pembangunan nasional terdapat pembangunan daerah yang memiliki tujuan menjalankan

otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Salah satu peran bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 15 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (3) “Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Terdapat upaya yang harus ditumbuhkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat di daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga mampu mencapai kesejahteraan masyarakatnya dengan baik. Pembangunan daerah ini juga bertujuan untuk menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, membangun macam-macam kesempatan kerja yang lebih banyak serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam hal ini, salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian daerah secara otonom yaitu kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerah sendiri diantaranya dengan memanfaatkan

potensi pasar yang dimana pasar merupakan tempat transaksi masal yang disediakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan PADes dan penyediaan kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

Pasar tradisional merupakan bagian sektor informal yang dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja masyarakat. Faktor tersebut juga merupakan keunggulan dari keberadaan pasar tradisional. Dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 42 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (10) tentang pengelolaan Pasar Desa “Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau *nama lain sejenisnya*, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar”.

Dari penjelasan tersebut, pasar memiliki ciri-ciri sebagai tempat yang disediakan oleh Pemerintah, bangunan berupa kios, los, toko dan tenda, juga sebagai tempat dapat melakukan system tawar-menawar. Salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan perekonomian yaitu dengan adanya pasar tradisional selain itu, pasar juga merupakan pusat Perputaran uang daerah dan sebagai lapangan pekerjaan.

Menurut Peraturan Desa Pasal 1 ayat (7) Tentang Penyelenggaraan Pasar, Parkir dan Pengelolaan Sampah Tahun 2021 “Pasar Desa adalah pasar

tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa Rajadesa dan Masyarakat desa”. Begitupun Pasar Wirabaya di Desa Rajadesa memenuhi kriteria Pasar Tradisional. Lahan dan bangunan Pasar Wirabaya dikelola oleh Pemerintah desa. Didalamnya juga berlaku system tawar menawar yang dimana proses tawar menawar inilah yang membuat ikatan sosial antara Pedagang dan Pembeli. Dan proses tawar menawar juga merupakan daya tarik dari Pasar Tradisional khususnya bagi Pasar Wirabaya.

Selanjutnya sebagian dari hasil observasi terkait dengan pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rajadesa ternyata sejauh ini tidak bisa berjalan secara optimal. Hal ini, terlihat dari beberapa Indikator yang menunjukkan adanya permasalahan, diantaranya

1. Kurang tegasnya pemerintahan desa dalam hal pengelolaan pasar sehingga terjadinya tarik-menarik status ruko akibat dari jual beli ruko yang tidak diketahui atau tidak ada dalam data pengelolaan pasar tersebut contohnya dilihat dari adanya beberapa ruko yang sudah terbagi dimana sebelumnya satu ruko dimiliki oleh satu pemilik, terbagi menjadi dua pemilik bahkan sampai terbagi menjadi empat bagian ruko akan tetapi jual beli hak guna ruko yang terbagi tersebut tidak diketahui oleh pengelola pasar bahkan tidak ada legalitas jual beli ruko yang

diketahui oleh pengelola pasar dan hanya diketahui oleh penjual dan pembeli hak guna ruko tersebut.

2. Tidak adanya ketegasan dari pemerintah desa dalam penataan fasilitas pasar sehingga banyak pedagang pasar yang tidak tertib dalam menjejerkan barang dagangannya yang dengan sengaja melebihi batas ruko tersebut yang mengakibatkan sempitnya jalan untuk dilalui konsumen atau pembeli dan tidak nyaman saat bertransaksi. Contohnya dilihat dari terganggunya akses jalan konsumen oleh barang dagangan yang dijajarkan melebihi batas ruko sampai barang dagangan tersebut menghalangi akses jalan para pembeli.
3. Tidak adanya aturan, wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan perekrutan pengurus Pasar sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pelaksanaan pengelolaan pasar mengalami hambatan Contohnya selama perekrutan kepengurusan Pasar ditunjuk langsung oleh Kepala Desa tidak melalui seleksi yang kriterianya dibutuhkan baik dari kemampuannya maupun dari pengalamannya serta dilihat dari adanya tiga kali pergantian ketua pengurus pasar dalam satu periode terakhir.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, bahwa dalam peningkatan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pengelola pasar sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kestabilan perekonomian desa. maka penyusun dapat mengidentifikasikan rumusan masalah yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Wirabaya oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan berasal dari kata “Peng” Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan ataupun rangkaian pekerjaan oleh sekelompok orang untuk tercapainya tujuan tertentu. Menurut Balderton dalam Adisasmita (2011: 21) mengemukakan bahwa "Istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan" teori tersebut dapat diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

1. Perencanaan (*Planning*)

Digunakan sebagai langkah awal dari suatu pengelolaan Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), yaitu :

“Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan”.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses penting setelah perencanaan yaitu dengan mengkalsifikasikan dan mengatur beberapa kegiatan dengan menempatkan pegawai yang disesuaikan dengan tempatnya.

Malayu Hasibuan (2007: 118-119) menyatakan :

“Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut”.

3. **Kepemimpinan (*Actuating*)**

Pada hakekatnya pergerakan mengarah pada kegiatan membimbing yang dilakukan oleh pemimpin kepada para anggota organisasi. pergerakan (*actuating*) merupakan proses setelah perencanaan dan pengorganisasian dilaksanakan atau proses ketiga dalam proses manajemen.

Menurut G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2018:183) yaitu :

“*Actuating* adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.”

4. **Pengendalian (*Controlling*)**

Pengendalian bisa diartikan juga sebagai pengawasan yang dimana merupakan faktor penting dalam memantau berbagai kegiatan selama proses pelaksanaan organisasi dan lebih menekankan dalam mengawasi tiap individu dari ancaman yang akan merugikan organisasi.

Menurut Earl P. Strong (dalam Brantas 2009:189), menyatakan bahwa :

“Pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.”

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Wirabaya di Desa Rajadesa yaitu terdiri dari Kepala Desa, BPD, Ketua pengelola Pasar, Anggota Pengelola Pasar dan masyarakat. Secara keseluruhan informan terdapat sebanyak 6 (enam) orang. Adapun Fokus dalam penelitian ini yaitu:

Perencanaan (*Planning*), dengan indikator:

1. Adanya program kerja pengelola Pasar Wirabaya
 2. Adanya identifikasi kekuatan dan kelemahan pengelolaan Pasar Wirabaya
 3. Adanya target dan tujuan pengelolaan Pasar Wirabaya
- Pengorganisasian (*Organizing*), dengan indikator:

1. Adanya pembagian tugas/kerja pengelola Pasar Wirabaya
2. Adanya aturan, wewenang dan tanggung jawab pengelola Pasar Wirabaya.

Kepemimpinan (*Actuating*), dengan indikator:

1. Adanya pengarahan yang dilakukan oleh pemimpin kepada anggota pengelolaan Pasar Wirabaya.
 2. Adanya Komunikasi dalam pengelolaan Pasar Wirabaya
- Pengendalian (*Controlling*), dengan indikator:

1. Adanya Pengawasan kegiatan dan adanya laporan kegiatan pengelolaan Pasar Wirabaya
2. Adanya ketegasan dari pemerintah desa dalam pengelolaan pasar Wirabaya
3. Adanya kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pengelola Pasar Wirabaya.

Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Pada dasarnya Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian pada dimensi perencanaan sejauh ini sudah berjalan optimal, dilihat dari hasil penelitian pada tiga indikator yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program kerja, Identifikasi kekuatan dan kelemahan serta target dan tujuan. Proses pencapaian target sudah bisa dilakukan sebagaimana mestinya dengan adanya adanya kontribusi dari pemerintah desa dan SDM yang terlibat didalamnya sehingga tujuan dari pada Pengelolaan pasar akan berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), yaitu:

Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi

mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil penelitian, dan teori menunjukkan bahwa adanya kesesuaian proses perencanaan dalam Pengelolaan Pasar Wirabaya sehingga dalam kenyataannya tidak ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat terhadap proses pencapaian tujuan, maka hal ini perlu dipertahankan supaya perkembangan Pengelolaan Pasar Wirabaya oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis bisa berkembang kearah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengorganisasian sejauh ini belum berjalan optimal, dilihat dari hasil penelitian pada dua indikator yang menyatakan bahwa dalam pembagian tugas/kerja pengelola Pasar Wirabaya serta aturan, wewenang dan tanggung jawab pengelola Pasar Wirabaya terdapat hambatan. Terlihat dari perekrutan ketua pengelola pasar Wirabaya yang tidak melibatkan masyarakat, terjadinya jual beli atau sewa ruko dan masyarakat dagang yang sengaja menjejerkan barang dagangannya melebihi batas ruko yang telah ditetapkan.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Malayu Hasibuan (2007: 118-119) menyatakan:

“Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan

bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut”.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil penelitian, dan teori menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian proses pembagian tugas/kerja pengelola Pasar Wirabaya serta aturan, wewenang dan tanggung jawab pengelola Pasar Wirabaya menunjukkan belum berjalan optimal. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan pengelola pasar yaitu dengan melakukan komunikasi kepada masyarakat bahwa untuk pada saat ini pemilihan ketua pengelola pasar Wirabaya dipilih langsung oleh kepala desa dan tidak mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih ketua pengelola pasar, pemerintah desa juga telah memberitahu masyarakat bahwa untuk kedepannya akan melibatkan masyarakat dalam pemilihan ketua pengelola pasar. selain itu, upaya yang dilakukan oleh pengelola pasar dan pemerintah desa dengan lebih tegas serta menerapkan sanksi dalam mengatur para pedagang yang melanggar aturan sehingga dapat mengurangi permasalahan yang terjadi dan mencegah terjadinya permasalahan yang lebih luas.

Hasil penelitian pada dimensi Kepemimpinan sejauh ini sudah berjalan optimal, dilihat dari hasil penelitian pada dua indikator yang menyatakan bahwa dalam pengarahannya yang dilakukan oleh pemimpin kepada anggota pengelolaan Pasar Wirabaya dan Komunikasi dalam pengelolaan Pasar Wirabaya sudah berjalan optimal. Dengan optimalnya dimensi kepemimpinan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sehingga pengelolaan pasar Wirabaya bisa lebih berkembang dan apa yang menjadi tujuan bisa tercapai.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2018:183) yaitu:

“Actuating adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian”.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil penelitian, dan teori menunjukkan bahwa adanya kesesuaian proses Kepemimpinan dalam Pengelolaan Pasar Wirabaya sehingga pelaksanaan dan penerapan dimensi Kepemimpinan telah berjalan dengan optimal dan dalam kenyataannya tidak ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat terhadap proses pencapaian tujuan dan, maka hal ini perlu dipertahankan supaya perkembangan Pengelolaan Pasar Wirabaya oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa

Kabupaten Ciamis bisa berjalan ke arah yang lebih baik lagi.

Hasil penelitian pada dimensi Pengendalian sejauh ini terdapat dua indikator yaitu pada indikator ketegasan dari pemerintah Desa dalam pengelolaan pasar Wirabaya dan indikator kegiatan Evaluasi yang dilakukan oleh pengelola Pasar Wirabaya telah berjalan dengan optimal. Akan tetapi, masih terdapat kendala pada indikator pengawasan kegiatan dan laporan kegiatan pengelolaan pasar yang dimana terdapat hambatan dalam hal pelaporan terlihat para pedagang tidak memberitahu pihak pengelola pasar Wirabaya sebelum bertindak sehingga berdampak pada tidak terawasinya para pelanggar yang dilakukan oleh pedagang yang menjual belikan atau menyewakan lahan ruko yang telah ditetapkan.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan Menurut Earl P. Strong (dalam Brantas 2009:189), menyatakan bahwa :

“Pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana”

Dengan demikian hasil penelitian dan teori pada dimensi pengendalian terlihat tidak adanya kesesuaian sehingga menunjukkan bahwa penelitian pada dimensi Pengendalian belum dilaksanakan dengan optimal. Maka dari itu, untuk meminimalisir hambatan

yang terjadi saat ini yaitu dengan menghimbau para pedagang yang melanggar diwajibkan untuk melapor dan menginformasikan kepada pihak pengelola pasar sebelum merubah, membangun, menjual atau menyewakan ruko. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan sehingga situasi dan kondisi pasar Wirabaya dapat terkoordinasi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Pasar Wirabaya oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat diketahui terdapat tujuh indikator yang telah berjalan dengan optimal, akan tetapi terdapat juga tiga indikator yang belum berjalan optimal. Diantaranya yaitu pada indikator pembagian tugas/kerja pengelola Pasar Wirabaya, indikator aturan, wewenang dan tanggung jawab pengelola Pasar dan pada indikator Pengawasan kegiatan dan laporan kegiatan pengelolaan Pasar Wirabaya. Hambatan yang timbul pada tiga indikator yaitu dalam perekrutan ketua pengelola pasar Wirabaya tidak melibatkan masyarakat, terjadinya jual beli atau sewa ruko serta masyarakat dagang yang sengaja menjejerkan barang dagangannya melebihi batas ruko yang telah ditetapkan, para pedagang tidak memberitahu atau melapor pada pihak pengelola pasar Wirabaya sebelum bertindak.

Pemerintah Desa, Ketua dan anggota Pengelola pasar Wirabaya melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa pemilihan saat ini dilakukan dengan langsung dipilih oleh Kepala Desa Rajadesa serta memberitahukan untuk kedepannya akan melibatkan masyarakat dalam pemilihan ketua pengelola pasar, mengharuskan pengelola pasar dan pemerintah desa supaya lebih tegas dalam mengatur para pedagang yang melanggar aturan. Ketegasan tersebut harus disertai dengan sanksi yang dapat memberikan jera bagi para pedagang yang melanggar aturan, dan menghimbau para pedagang yang melanggar diwajibkan untuk melapor dan menginformasikan kepada pihak pemerintah desa atau pengelola pasar sebelum merubah, membangun, menjual atau menyewakan ruko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Boediono, (2002), *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Edisi 2*. Yogyakarta: BPEE.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu.S.P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik, Alfabeta*, Bandung. Sofian Efendi dan Masri Singarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survey*. LP3ES., Jakarta